Ekonomis: Journal of Economics and Business

Volume 09, Issue 02, September 2025, p1103-1113

Webite: https://ekonomis.unbari.ac.id, E-Mail: ekonomis.unbari@gmail.com
ISSN 2597-8829 (Online), DOI: 10.33087/ekonomis.v9i2.2685

Article history:
Received: 08 August 2025
Revised: 03 September 2025
Accepted: 07 September 2025
Available online: 11 September 2025

Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 2019-2023)

Dilla Aprilia, Raden Budi Hendaris
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Achmad Yani
Corresponding Author: dillaaprilia_21p059@ak.unjani.ac.id, budi.hendaris@lecture.unjani.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh opini dan temuan audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja keuangan 27 pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2019-2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan terbukti bahwa opini dan temuan audit memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun secara parsial opini audit berpengaruh positif, sementara temuan audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 2019-2023.

Kata Kunci: opini audit, temuan audit, kinerja keuangan pemerintah daerah.

ABSTRACT
This study aims to analyze the influence of audit opinions and findings issued by the Supreme Audit Agency on the financial performance of 27 district and city governments in West Java Province during the period 2019-2023. The data used in this study are secondary data obtained from the official website of the West Java Provincial Audit Agency and the Central Statistics Agency (CSA) of West Java Province. The analysis method used is multiple linear regression. The results of the analysis indicate that simultaneously, audit opinions and findings have a significant influence on the financial performance of local governments. However, partially, audit opinions have a positive effect, while audit findings have a negative and significant effect on the financial performance of district and city governments in West Java Province 2019-2023.

Keywords**:** *audit opinion, audit findings, regional government financial performance.*

PENDAHULUAN

Sejak tahun 1999, Indonesia mulai memberlakukan kebijakan otonomi daerah yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan keuangan secara mandiri. Implementasi otonomi daerah membuka peluang bagi setiap daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal dalam pengelolaan sumber daya serta anggaran publik guna memenuhi kebutuhan dan pelayanan masyarakat secara lebih efektif (Sedek & Kusumawati, 2024). Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menjadi hak, kewenangan, serta tanggung jawab pemerintah daerah. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara mandiri sesuai dengan prinsip desentralisasi (Ditasari & Sudrajat, 2020).

Pengelolaan daerah yang efektif dan efisien berperan penting dalam memastikan kelancaran operasional pemerintah daerah, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap peningkatan kinerja keuangan. Kinerja keuangan pemerintah daerah sendiri merupakan komponen krusial yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah secara menyeluruh. (Hendaris & Sastradipraja, 2024). Selain itu, kinerja keuangan berfungsi sebagai indikator yang dapat digunakan untuk menilai kapasitas fiskal suatu daerah dalam menetapkan serta menjalankan kebijakan secara tepat. Pengukuran ini juga penting untuk memastikan keberlanjutan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Selain itu, kinerja keuangan berfungsi sebagai indikator yang dapat digunakan untuk menilai kapasitas fiskal suatu daerah dalam menetapkan serta menjalankan kebijakan secara tepat. Pengukuran ini juga penting untuk memastikan keberlanjutan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Tabel 1
Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 2019-2023

Kabupaten dan Kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Bandung	17,89	19,07	19,05	20,93	20,38
Kab. Bekasi	43,00	42,89	36,56	43,04	43,47
Kab. Bogor	38,84	36,56	41,23	41,38	41,42
Kab. Ciamis	8,96	9,70	10,23	11,24	9,84
Kab. Cianjur	15,73	15,02	19,55	15,96	17,42
Kab. Cirebon	15,94	16,35	17,21	20,08	18,53
Kab. Garut	10,15	10,55	11,97	10,50	11,20
Kab. Indramayu	11,61	15,23	15,76	17,11	17,81
Kab. Karawang	28,99	29,80	33,36	33,69	33,92
Kab.Kuningan	10,97	10,76	12,38	12,93	12,33
Kab. Majalengka	14,84	15,15	15,20	17,39	17,51
Kab. Purwakarta	19,37	19,48	21,46	24,91	23,39
Kab. Subang	15,21	15,41	15,69	15,97	18,09
Kab. Sukabumi	15,25	16,83	16,17	17,35	17,33
Kab. Sumedang	15,10	15,30	16,58	17,97	18,23
Kab. Tasikmalaya	7,52	8,51	11,57	9,69	9,49
Kota Bandung	39,93	36,57	37,61	43,01	42,57
Kota Bekasi	40,95	40,24	43,98	44,32	44,45
Kota Bogor	39,69	35,91	40,66	41,18	45,11
Kota Cirebon	28,14	26,76	29,78	36,57	36,55
Kota Depok	39,95	39,71	45,26	44,81	46,20
Kota Sukabumi	26,76	28,80	27,68	29,96	32,43
Kota Tasikmalaya	15,07	17,85	21,92	17,94	21,44
Kota Cimahi	25,18	25,77	26,65	29,65	30,43
Kota Banjar	12,64	15,33	16,97	17,32	17,33
Kab. Bandung Barat	18,19	18,37	19,28	24,08	22,94
Kab. Pangandaran	7,79	6,70	13,14	17,27	18,20

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa pada periode 2019–2023, kemampuan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat masih didominasi oleh pendapatan transfer yang nilainya lebih besar dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini mengindikasikan ketergantungan fiskal yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat. Akibatnya, pada tahun 2023, sebanyak 11 dari 27 kabupaten dan kota mengalami penurunan rasio derajat desentralisasi, yang mencerminkan belum optimalnya kinerja keuangan daerah serta kurangnya konsistensi dalam penguatan kapasitas fiskal daerah dari tahun ke tahun.

Tabel 2
Tingkat Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 2019-2023

Rasio Derajat Desentralisasi	Kemampuan Keuangan	Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat				
		2019	2020	2021	2022	2023
00.00-10.00	Sangat Kurang	3	3	0	1	2
10.00-20.00	Kurang	14	14	15	12	11
20.01-30.00	Sedang	4	4	5	6	4
30.01-40.00	Cukup	4	4	2	2	4
40.01-50.00	Baik	2	2	5	6	6
>50.00	Sangat Baik	0	0	0	0	0

Sumber: data olahan

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada Provinsi Jawa Barat, terdapat tiga kabupaten/kota yang tergolong dalam kategori "Sangat Kurang" (00,00–10,00), sementara empat belas daerah lainnya masuk dalam kategori "Kurang" (10,01–20,00). Di sisi lain, hanya dua daerah yang berada dalam kategori "Baik" (40,01–50,00), dan tidak satu pun yang mencapai kategori "Sangat Baik" (>50,00). Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat derajat desentralisasi di wilayah tersebut masih tergolong rendah. Selain itu, distribusi kategori tersebut tidak mengalami perubahan yang berarti pada tahun 2020, yang menandakan belum adanya perbaikan signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah.

Pada tahun 2021, jumlah daerah yang termasuk dalam kategori "Sangat Kurang" menurun menjadi nol. Namun demikian, terjadi peningkatan pada jumlah daerah dalam kategori "Kurang" menjadi lima belas wilayah. Kategori "Sedang" dan "Cukup" masing-masing mencatat lima dan dua daerah, sedangkan jumlah daerah dalam kategori "Baik" mengalami peningkatan menjadi lima. Sementara itu, kategori "Sangat Baik" tetap tidak mengalami perubahan, yakni nol daerah. Perkembangan ini mengindikasikan adanya perbaikan kemampuan keuangan di beberapa daerah. Memasuki tahun 2022, jumlah daerah dalam kategori "Sangat Kurang" kembali meningkat menjadi satu, sementara kategori "Kurang" menurun menjadi dua belas daerah. Pada saat yang sama, kategori "Baik" mencatat peningkatan menjadi enam daerah, meskipun kategori "Sangat Baik" tetap tidak mengalami perubahan.

Pada tahun 2023, jumlah daerah yang tergolong dalam kategori "Sangat Kurang" meningkat menjadi dua, sedangkan kategori "Kurang" tercatat sebanyak sebelas daerah. Kategori "Sedang" dan "Cukup" menunjukkan kestabilan dengan masing-masing empat daerah. Sementara itu, kategori "Baik" tetap berada pada angka enam daerah dan tidak ada daerah yang masuk dalam kategori "Sangat Baik". Meskipun terjadi peningkatan dalam derajat desentralisasi secara umum, beberapa daerah masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam hal pengelolaan keuangan secara optimal.

Sumber: data olahan

Gambar 1
Grafik Tingkat Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 2019-2023

Gambar 1 selama lima tahun terakhir, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya tercatat sebagai tiga daerah dengan rata-rata tingkat derajat desentralisasi berada pada kisaran 00,00–10,00, yang mengindikasikan kemampuan keuangan sangat kurang. Selain ketiga daerah tersebut, terdapat sepuluh kabupaten/kota lainnya yang memiliki rata-rata derajat desentralisasi antara 10,00–20,00 dan tergolong dalam kategori kemampuan keuangan "Kurang". Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendanaan utama dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen pendapatan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Apabila jumlah PAD melebihi penerimaan dari transfer pemerintah pusat, hal ini mencerminkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki. Pemanfaatan potensi tersebut secara efektif dapat mendorong kemandirian fiskal serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan di tingkat regional (Sedek & Kusumawati, 2024) . Dengan demikian, tingkat kemandirian suatu daerah dapat dievaluasi melalui besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil dihimpun. PAD mencerminkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai proses pembangunan secara mandiri, tanpa ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat (Karno & Alliyah, 2021).

Dalam upaya mewujudkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang optimal, penting untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai faktor yang berpotensi menjadi hambatan. Salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan tersebut adalah opini audit. Opini audit merupakan pernyataan hasil pemeriksaan yang bertujuan menilai tingkat kewajaran dan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Putra & Romli, 2020). Selain itu, temuan audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga berpotensi memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan audit ini mengacu pada berbagai permasalahan yang diidentifikasi oleh BPK dalam proses pemeriksaan laporan keuangan daerah, khususnya terkait pelanggaran terhadap sistem pengendalian internal maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Manoppo et al., 2023).

Penelitian terdahulu pengaruh opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah masih belum konsisten, diantaranya penelitian Chaerani & Firmansyah (2024), Zamzami & Rakhman (2023) dan Suandani & Astawa (2021) yang menemukan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Nurhalimah & Wicaksono (2024), Rasyid et al. (2022) dan Karno & Alliyah (2021) bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kemudian pengaruh temuan audit badan pemeriksa keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Penelitian Sedek & Kusumawati (2024), dan Manoppo et al. (2023) bahwa temuan audit badan pemeriksa keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Tandiseru & Pesudo (2023) dan Rasyid et al. (2022) bahwa temuan audit badan pemeriksa keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangakan penelitian sekarang ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh opini audit dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 2019-2023.

Tinjauan Pustaka

Teori Agensi (Agency Theory)

Agency theory menurut (Jensen & Meckling, 1976; Rasyid et al., 2022) Hubungan kerja antara pemilik (principal) dan manajemen (agent) mencerminkan adanya mekanisme koordinasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan selaras dengan kepentingan principal. Dalam pelaksanaan hubungan tersebut, principal mendelegasikan wewenang kepada agent untuk mengambil keputusan atas nama principal, sehingga tercipta struktur tanggung jawab yang mengharuskan agent bertindak sesuai dengan tujuan utama pihak pemberi kuasa. Dengan cara, *agent* dapat melaporkan kepada *principal* sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wewenang yang telah diberikan. Hal tersebut diperjelas Ditasari & Sudrajat (2020) Pemberian wewenang secara penuh kepada pemerintah daerah menimbulkan dinamika hubungan keagenan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Permasalahan keagenan dalam konteks ini muncul akibat terjadinya asimetri informasi, di mana pemerintah daerah memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan masyarakat. Ketidakseimbangan informasi ini berpotensi menimbulkan risiko *moral hazard*, yaitu

ketika pemerintah bertindak berdasarkan kepentingan sendiri alih-alih mewakili kepentingan publik secara transparan dan akuntabel (Chaerani & Firmansyah, 2024). Diharapkan bahwa agent akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang diharapkan oleh principal (Rasyid et al., 2022).

Teori keagenan dalam sektor publik menitikberatkan pada upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui pengelolaan keuangan yang efisien, pembangunan infrastruktur yang mendukung kebutuhan publik, serta penyediaan layanan yang merata dan efektif di seluruh wilayah (Aswar, 2019). Sebagai bentuk tanggung jawab, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat (Karno & Alliyah, 2021). Berdasarkan *agency theory* maka dari itu pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap publik (NurFaidah & Novita, 2022) .

Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Opini audit merupakan pernyataan profesional atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menilai tingkat kewajaran informasi yang disajikan (Pratama et al., 2022). Opini audit memengaruhi tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah (Chaerani & Firmansyah, 2024). Menurut Wijayanti & Suryandari (2020) Pemerintah daerah sebagai agent tidak selalu dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent (Karno & Alliyah, 2021). Semakin baik opini audit, semakin baik pula kinerja keuangan suatu pemerintah daerah karena masyarakat akan lebih percaya atas kredibilitas pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah.

Pernyataan ini didukung oleh penelitian Chaerani & Firmansyah (2024) menunjukan bahwa opini audit secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Penelitian Zamzami & Rakhman (2023) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan penelitian Suandani & Astawa (2021) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H_1: opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pengaruh Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan sejumlah pelanggaran dalam laporan keuangan pemerintah daerah melalui temuan audit yang dilakukan. Temuan ini menjadi dasar bagi upaya perbaikan dan evaluasi, dengan harapan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Ditasari & Sudrajat, 2020) Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan secara lebih efisien, dan rekomendasi yang relevan dapat disusun untuk menyelesaikan permasalahan yang teridentifikasi dalam temuan audit (Rasyid et al., 2022). Menurut (Wijayanti & Suryandari, 2020) Pengawasan terhadap pemerintah daerah diperlukan guna memastikan bahwa pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Asimetri informasi antara pemerintah sebagai agent dan masyarakat sebagai principal berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, pelaksanaan audit dan pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi penting untuk menjamin terciptanya kinerja pemerintah daerah yang lebih transparan dan akuntabel (Nugraheni & Adi, 2020). Semakin banyak kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau banyaknya temuan audit badan pemeriksa keuangan menunjukkan rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah (Wijayanti & Suryandari, 2020). Kondisi tersebut terjadi akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah (Dasmar et al., 2020).

Pernyataan ini didukung penelitian Tandiseru & Pesudo (2023) menunjukkan bahwa temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, penelitian Rasyid et al. (2022) menunjukkan bahwa temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah,

dan penelitian Ditasari & Sudrajat (2020) menunjukkan bahwa temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keaungan Pemerintah Daerah.
H_2: temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah\

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Objek penelitian mencakup pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi www.jabar.bpk.go.id dan www.jabar.bps.go.id. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling* dengan pendekatan sensus atau *total sampling*, di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 27 pemerintah daerah, yaitu 18 kabupaten dan 9 kota. Dengan periode pengamatan selama lima tahun, total data yang berhasil dikumpulkan berjumlah 135 observasi.

Alat analisis yang digunakan diantaranya: a) pengujian normalitas. Penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan pendekatan Kolmogorov-Smirnov (K-S). Kriteria penilaian menunjukkan bahwa data dikategorikan normal jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) melebihi angka 0,05, sedangkan nilai di bawah 0,05 menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Hasil dari pengujian ini terhadap seluruh variabel ditampilkan pada bagian berikutnya; b) multikoliniearitas dengan nilai tolerance untuk semua variabel > 0,10; dan nilai *variance inflation factor* (VIF) untuk semua variabel < 10; c) pengujian heteroskedastisitas dilakukan melalui analisis scatterplot. Jika hasil scatterplot menunjukkan penyebaran titik-titik yang acak dan tidak membentuk pola tertentu, serta tersebar di atas dan di bawah garis nol pada sumbu Y, maka dapat diindikasikan tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas; d) pengujian autokorelasi dengan melihat nilai Durbin-Watson dibandingkan dengan batas pada tabel Durbin-Watson dengan tingkat signifikansi 0,05, jumlah sampel (n) sebanyak 135, dan dua variabel bebas (k = 2). Berdasarkan perhitungan diperoleh batas bawah (dL) sebesar 1,7490 dan batas atas (dU) sebesar 2,251 atau nilai DW berada dalam rentang 1,7490 < DW < 2,251 (4 – dU).

Pengujian hipotesis (uji statistik t) dilakukan dengan melihat perbandingan t_{hitung} dan t_{tabel} dimana jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh variabel (X) terhadap variabel dependen (Y). Sedangkan uji F dilihat dari perbandingan F_{hitung} dan F_{tabel}. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), dan terakhir pengujian koefisien determinasi (R-Square).

HASIL

Tabel 3
Hasil Uji Kolmogorov-smirnov (K-S)

		Unstandardized Residual
N		135
Normal Parameters[a,b]	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,17813033
Most Extreme Differences	Absolute	0,061
	Positive	0,061
	Negative	-0,055
Test Statistic		0,061
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]		.200[d]

Sumber: data olahan

Tabel 3 mengindikasikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas. Hal tersebut tercermin dari nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 yang melebihi ambang batas signifikansi 0,05. Mengacu pada metode uji Kolmogorov-Smirnov (K-S), nilai probabilitas residual di atas 0,05 menunjukkan bahwa distribusi data bersifat normal. Oleh karena itu, baik variabel independen maupun dependen dalam model ini dinyatakan terdistribusi secara normal dan layak untuk dianalisis lebih lanjut dalam model regresi.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Opini Audit	0,997	1,003
	Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan	0,997	1,003

Sumber: data olahan

Tabel 4 menjelaskan nilai *tolerance* untuk variabel opini audit (X1) dan temuan audit (X2) tercatat masing-masing sebesar 0,997; yang melebihi batas minimal 0,10. Selain itu, nilai *variance inflation factor* (VIF) untuk kedua variabel tersebut adalah 1,003, masih di bawah batas maksimal 10. Kondisi ini mengindikasikan tidak adanya multikolinearitas antara variabel independen, sehingga hasil analisis regresi tetap valid dan tidak terganggu oleh korelasi antarvariabel.

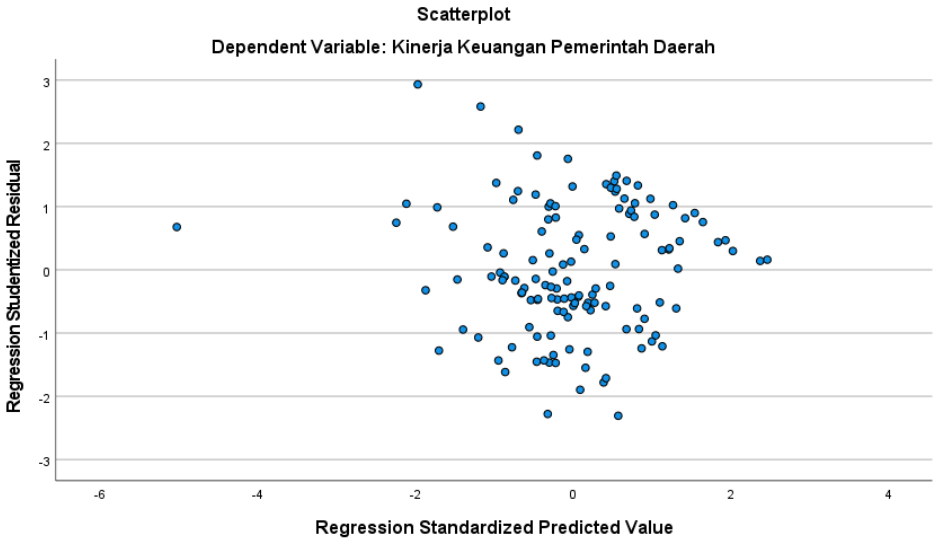

Sumber: data olahan

Gambar 2
Grafik *Scatterplot*

Gambar 2 menjelaskan bahwa titik-titik data tersebar secara acak di sekitar garis nol pada sumbu Y tanpa menunjukkan pola tertentu yang konsisten. Pola penyebaran tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan. Dengan demikian, model regresi ini dinilai memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan untuk memprediksi kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan variabel bebas, yaitu opini audit serta temuan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.849[a]	0,720	0,714	6,15098	1,926

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,926; artinya nilai DW berada dalam rentang 1,7490 < 1,926 < 2,251 (4 – dU), maka dapat dikatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari indikasi autokorelasi, baik yang bersifat positif maupun negatif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa data residual bersifat independen, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	*(Constant)*	1,893	0,107		17,639	0,000
	Opini Audit	0,102	0,023	0,317	4,385	0,000
	Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan	-0,796	0,124	-0,463	-6,406	0,000

Sumber: data olahan

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 6, dapat dibuatkan persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$Y= \alpha + \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2$

$Y = 1,893 + 0,102\ X_1 – 0,796\ X_2$

Hasil analisis regresi linear berganda memberikan gambaran mengenai sejauh mana masing-masing variabel independen, yaitu Opini Audit dan Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan, berkontribusi terhadap variabel dependen berupa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penjelasan mengenai pengaruh dari masing-masing variabel dalam persamaan regresi tersebut disampaikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) bernilai sebesar 1,893 menunjukkan ketika opini audit (X_1) dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (X_2) bernilai nol (0), maka kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) bernilai 1,893.
2. Nilai koefisien regresi dari variabel opini audit (X_1) sebesar 0,102 yang artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan opini audit (X_1) meningkat sebesar satu-satuan, maka kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,102. Koefisien bernilai positif antara opini audit (X_1) dengan kinerja keuangan pemerintah daerah (Y), artinya semakin baik kualitas opini audit (X_1) maka nilai kinerja keuangan pemerintah daerah (X_2) semakin meningkat.
3. Nilai koefisien regresi dari variabel temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (X_2) sebesar (-0,796) yang artinya jika variabel independen lain nilainya akan tetap dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (X_2) meningkat satu-satuan, maka kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) akan menurun sebesar (-0,796). Koefisien bernilai negatif antara temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (X_2) dengan kinerja keuangan pemerintah daerah (Y), Artinya semakin besar jumlah temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (X_2), maka nilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) akan semakin menurun.

Berdasarkan Tabel 6 dapat juga diketahui hasil pengujian secara parsial atau uji t, kemudian menghitung nilai t_{tabel} dengan rumus (α/2 ; n-k-1), dimana nilai n = jumlah pengamatan dan k = jumlah variabel independen, maka diperoleh nilai t_{tabel} sebagai berikut: $t_{tabel} = t\ (\alpha/2\ ;\ n\text{-}k\text{-}1) = t\ (0,05/2\ ;\ 135 – 2 – 1) = 1,978$. Berdasarkan hasil pengujian parsial dan nilai t_{tabel} maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: Hipotesis petama variabel opini audit (X_1) menunjukkan hasil t_{hitung} sebesar 4,385 yang artinya bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ hal tersebut menunjukkan bahwa H_0 ditolak H_a diterima; maka dapat dikatakan bahwa variabel opini audit (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Artinya opini audit merupakan hasil pemeriksaan dari evaluasi yang dilakukan oleh auditor terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, maraknya kasus suap antara auditor dan pemerintah daerah menunjukkan menurunnya indepedensi. Oleh karena itu, menjaga indepedensi menjadi hal yang sangat krusial agar para auditor dapat menjalankan tugas dengan jujur dan fakta, sehingga praktik manipulasi opini audit dapat dicegah.

Hal ini sejalan dengan *agency theory* yang menjelaskan hubungan *agent* dengan *principal* yang dimana pemerintah selaku *agent* terus berupaya menerapkan pengelolaan keuangan dengan baik dan senantiasa memberikan pertanggungjawaban sehingga memperoleh opini audit yang baik. Opini audit pemerintah daerah yang semakin baik akan membuat masyarakat menjadi lebih percaya dengan pemerintah daerah yang dimana kinerja keuangan ini dapat diukur dengan membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan jumlah pendapatan daerah. Melalui rasio kinerja keuangan tersebut dapat dinilai efisien atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Chaerani & Firmansyah (2024), Zamzami & Rakhman (2023) dan Suandani & Astawa (2024) yang menunjukkan bahwa opini audit secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut bahwa opini audit yang lebih tinggi, maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Opini audit yang baik dapat berfungsi sebagai intensif bagi pemerintah daerah untuk mengurangi risiko keagenan antara pemerintah daerah dan masyarakat sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Pratama et al. (2022) dan Ditasari & Sudrajat (2020) yang menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya semakin baik hasil opini audit dapat menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi semakin buruk. Hal ini disebabkan bahwa pemberian opini hanya menilai kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, pemeriksaan akun maupun catatan akuntansi pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal.

Hipotesis yang kedua (H2) variabel temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan hasil t_{hitung} sebesar (-6,406) dan nilai t_{tabel} sebesar 1,978 yang artinya bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ hal tersebut menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak; maka dapat dikatakan bahwa variabel temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Artinya bahwa peningkatan jumlah temuan audit dapat berkontribusi pada penurunan kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Penyebabnya adalah adanya penyalahgunaan anggaran yang terdapat dalam laporan keuangan yang ditemukan oleh BPK yang melanggar ketentuan pengendalian internal dan ketentuan perundang-undangan yang belaku.

Hal ini sejalan dengan *agency theory* bahwa pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaannya dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu adanya audit dan pengawasan yang dilakukan oleh BPK untuk menjamin kinerja pemerintah daerah yang lebih baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Tandiseru & Pesudo (2023) dan Rasyid et al. (2022) yang menunjukkan bahwa temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya semakin banyak temuan audit yang ditemukan, maka kinerja keuangan pemerintah daerah cenderung lebih rendah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Latifah & Amalia (2022) dan Wijayanti & Suryandari (2020) yang menunjukkan bahwa temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut karena Pemerintah daerah yang menerima laporan audit dalam jumlah besar belum tentu memiliki kinerja keuangan yang buruk.

Tabel 7
Hasil Uji Simultan (Uji F)

	Model	Sum of Squares	*Df*	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,917	2	0,959	29,763	.000[b]
	Residual	4,252	132	0,032		
	Total	6,169	134			

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat nilai F_{tabel} dengan rumus (k ; n-1) di mana n = jumlah pengamatan dan k = jumlah variabel independen, maka diperoleh F_{tabel} sebesar 3,06. Hasil pengujian menunjukkan f_{hitung} 29,763 > f_{tabel} 3,06 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang memiliki arti bahwa variabel opini audit (X_1) dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (X_2) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya angka dari variabel opini audit dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan akan bersama-sama mempengaruhi terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dan menunjukkan bahwa opini audit dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 2019-2023.

Tabel 8
Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.849[a]	0,720	0,714	6,15098

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 72% menunjukkan bahwa sebesar 72% kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) dipengaruhi oleh variabel opini audit (X_1) dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (X_2). Sedangkan sebesar 28% kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) dipengaruhi oleh variabel yang lain selain variabel dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa secara simultan, opini audit dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 2019-2023. Namun secara parsial, opini audit berpengaruh positif dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 2019-2023.

DAFTAR PUSTAKA

Aswar, K., 2019. Financial Performance of Local Governments in Indonesia. *European Journal of Business and Management Research*, *4*(6), 1–6.

Chaerani, E. Y., Firmansyah, A., 2024. Regional Revenues, Audit Opinions, Local Government Financial Performance: The Moderating Role of Capital Expenditure. *Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi dan Bisnis*, *6*(1), 90–103.

Dasmar, T., Basri, Y. M., Indrawati, N., 2020. Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Al Iqtishad*, *2*, 39–57.

Ditasari, R. A., Sudrajat, M. A., 2020. Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, *4*(2), 104–117.

Hendaris, R. B., Sastradipraja, U., 2024. Analysis of Factors Affecting Local Government Financial Performance. *DIJEFA: Dinasti Internasional Journal of Economics, Finance & Accounting,* 5(1)*,* 5399-5410*.*

Jensen, M. C., Meckling, W. H., 1976 Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.

Karno, D. K. S., Alliyah, S., 2021. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Inspirasi Ekonomi*, *3*(1), 40–55.

Latifah, I. A., Amalia, D., 2022. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Kinerja Keuangan. *National Multidisciplinary Sciences*, *1*(5), 735–743.

Manoppo, D. C., Winerungan, R. R., Tanor, L. A. O., 2023. Pengaruh Tingkat Kemakmuran Daerah Dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jaim: Jurnal Akuntansi Manado*, *4*(2), 428–437.

Nugraheni, E., Adi, P. H., 2020. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Meta-Analisis. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, *20*(1), 19–42.

NurFaidah, N., Novita, N., 2022. Analisis Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Berdasarkan Opini Audit, Temuan Audit atas Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, *27*(1), 55–65.

Nurhalimah, M., Wicaksono, D., 2024. Pengaruh Opini Audit Bpk Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Akrual Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, *6*(1), 78–87.

Putra, V. D. C., Romli, 2020. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan *Good Government Governance* terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Pemerintah

Daerah Kota Bandung. *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, *17*(1), 46-65.

Pratama, A. B., Maslichah, M., Mawardi, M. C., 2022. Pengaruh Opini Audit Bpk, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2017-2019. *E-JRA*, *11*(2), 25–34.

Rasyid, Y., Suci, R. G., Putri, A. M., 2022. Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Pendidikan Ekonomi UM Metro*, *10*(2), 80–93.

Sedek, S. C. B. T., Kusumawati, E., 2024. Pengaruh *Leverage*, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, Temuan Audit BPK, Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, *Innovative: Journal of Social Science Research*, *4*(1). 9081-9100

Suandani, K. P., Astawa, G. P. B., 2021. Pengaruh Opini Audit, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, *12*(3), 728–739.

Tandiseru, A. A. T., Pesudo, D. A. A., 2023. Pengaruh Karateristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kab/Kota di Pulau Sulawesi). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, *24*(1), 1–14.

Wijayanti, Y., Suryandari, D., 2020. The Effect of Regional Characteristics, Leverage, Government Complexity, BPK Audit Findings and Opinions on Local Government Financial Performance. *Accounting Analysis Journal*, *9*(1), 30–37.

Zamzami, F., Rakhman, F., 2023. Determinants of Local Government Financial Performance in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, *12*(5), 332–347.